

TRANSFORMASI AGAMA SHINTO DI JEPANG: DARI ERA EDO HINGGA ERA RESTORASI MEIJI

Muhammad Khalaf, Muhammad Wildan Arif Amrulloh
Universitas Darussalam Gontor

mukhfafadhlur@gmail.com, muhammadwildan@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi posisi agama Shinto dalam dinamika hubungan agama dan negara di Jepang dari era Edo hingga era Restorasi Meiji dengan pendekatan historis-analitis berbasis studi kepustakaan. Pada era Edo, Shinto berfungsi terutama sebagai fondasi kultural dan spiritual masyarakat yang hidup berdampingan secara sinkretis dengan Buddhisme, tanpa menjadi instrumen politik utama dalam struktur pemerintahan Tokugawa. Perubahan mendasar terjadi pada era Meiji ketika negara modern Jepang dibangun dengan menempatkan kaisar sebagai pusat simbolik dan ideologis. Melalui kebijakan pemisahan Shinto dan Buddhisme (*shinbutsu bunri*), negara merekonstruksi Shinto menjadi Shinto Negara (*Kokka Shinto*), yaitu sistem yang dilembagakan untuk menanamkan loyalitas politik, membentuk identitas nasional, serta mengintegrasikan mitologi kekaisaran ke dalam pendidikan dan ruang publik. Kajian ini menunjukkan bahwa proses tersebut menggeser fungsi agama dari ranah spiritual-komunal menuju instrumen ideologis negara. Implikasi utamanya adalah tampaknya kecenderungan reduksi makna agama menjadi alat legitimasi kekuasaan, yang berdampak pada pembatasan peran agama lain di ruang publik. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga perbedaan yang proporsional antara fungsi keagamaan dan kepentingan politik agar agama tidak kehilangan orientasi transendennya.

Kata Kunci: *Shinto; Era Edo; Restorasi Meiji; Transformasi Agama; Jepang*

Abstract

*This article examines the transformation of Shinto's position within the dynamics of religion and state in Japan from the Edo period to the Meiji Restoration, using a historical-analytical approach grounded in literature studies. During the Edo period, Shinto primarily functioned as a cultural and spiritual foundation within communities, coexisting syncretically with Buddhism, without serving as a major political instrument in the Tokugawa government structure. A fundamental shift occurred during the Meiji era, when the modern Japanese state was constructed with the emperor as its symbolic and ideological center. Through the policy of separating Shinto and Buddhism (*shinbutsu bunri*), the state reconstructed Shinto into State Shinto (*Kokka Shinto*), an institutionalized system designed to instill political loyalty, shape national identity, and integrate imperial mythology into education and public life. This study demonstrates that this process shifted the role of religion from a spiritual-communal domain toward an ideological instrument of the state. The main implication is a tendency to reduce the meaning of religion to a tool for legitimizing power, affecting the public role of other religions. These findings underscore the importance of maintaining a proportional distinction between religious functions and political interests to preserve the transcendental orientation of religion.*

Keywords: *Shinto; Edo Period; Meiji Restoration; Religious Transformation; Japan*

Pendahuluan

Shinto merupakan kepercayaan asli Jepang yang telah berkembang sejak masa kuno dan mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarahnya. Dalam perkembangannya, Shinto tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika politik Jepang, sehingga perubahan struktur kekuasaan kerap berdampak langsung pada posisi dan bentuk praktik keagamaan ini. Salah satu periode paling

penting dalam proses tersebut adalah masa peralihan dari era Edo (1603–1868) ke era Restorasi Meiji (1868–1912), yang menandai dimulainya transformasi besar dalam wajah keagamaan Shinto di Jepang (Widarahesty & Ayu, n.d.-a).

Selama lebih dari dua abad era Edo, Jepang berada di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Rezim ini berhasil menciptakan stabilitas politik setelah periode panjang konflik internal dengan menerapkan sistem pemerintahan *bakuban*, yaitu pembagian kekuasaan antara shogun sebagai penguasa pusat dan para *daimyo* sebagai penguasa wilayah. Demi mempertahankan stabilitas tersebut, pemerintahan Tokugawa menerapkan kebijakan politik luar negeri yang dikenal sebagai *sakoku* (politik isolasi), yang secara ketat membatasi hubungan Jepang dengan dunia luar (Widarahesty & Ayu, n.d.-b). Kebijakan ini bertujuan mencegah masuknya pengaruh politik, ideologi, dan agama asing yang dianggap berpotensi mengganggu tatanan sosial serta legitimasi kekuasaan shogun.

Dalam konteks ini, Shinto menempati posisi yang relatif termarginalkan secara politik. Shinto tidak dijadikan sebagai ideologi negara, melainkan lebih berfungsi sebagai kumpulan ritual dan tradisi lokal di tingkat masyarakat. Praktiknya sering kali menyatu dengan ajaran Buddha dalam tradisi yang dikenal sebagai *shinbutsu-shūgō*, yakni sinkretisme antara Shinto dan Buddhisme sebelum era Restorasi Meiji. Dalam praktik tersebut, *kami* (dewa-dewa lokal) kerap dipahami sebagai manifestasi atau pelindung ajaran Buddha, dan ritual Shinto dijalankan berdampingan dengan ritual Buddhis selama berabad-abad (Yoshida, 2021).

Menjelang akhir era Edo, muncul berbagai dinamika internal dan tekanan eksternal yang mendorong Jepang untuk mulai membuka diri terhadap dunia luar. Perubahan ini mencapai titik penting dengan kedatangan Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853. Melalui Konvensi Kanagawa tahun 1854, Jepang dipaksa membuka pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Peristiwa ini mengakhiri kebijakan isolasi dan menjadi titik balik masuknya pengaruh Barat ke dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Jepang (Pakpahan et al., 2025b).

Perkembangan tersebut kemudian mengarah pada dimulainya era Restorasi Meiji, yakni masa modernisasi besar-besaran di berbagai bidang, termasuk bidang keagamaan. Salah satu kebijakan penting pada periode ini adalah pemisahan resmi antara Shinto dan Buddhisme yang dikenal sebagai *shinbutsu bunri*. (*Dampak Restorasi Meiji Terhadap Agama Buddha....Pdf*, n.d). Dalam kerangka pembangunan negara modern, Shinto kemudian ditetapkan sebagai agama nasional dan dijadikan alat pemersatu bangsa. Shinto direkonstruksi sebagai tradisi keagamaan yang “murni”, terlepas dari unsur-unsur Buddhis, serta mulai dilembagakan melalui sistem pendidikan dan berbagai ritual kenegaraan. Kebijakan ini memperkuat posisi Shinto sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas nasional Jepang pada era Meiji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis posisi dan peran agama Shinto pada era Edo yang cenderung termarginalkan akibat kebijakan *sakoku* dan praktik sinkretisme *shinbutsu-shūgō*, serta menelaah transformasinya pada era Restorasi Meiji melalui kebijakan *shinbutsu bunri*. Kajian ini juga menyoroti bagaimana penetapan Shinto sebagai agama nasional berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional, proyek modernisasi negara, dan upaya pemersatu masyarakat Jepang pada masa tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) studi kepustakaan di pilih karena penelitian ini berfokus kepada pengkajian konsep perkembangan agama Shinto di Jepang berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika agama Shinto dalam konteks sejarah, sosial, dan politik tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan historis-analitis yang bertujuan menelusuri transformasi posisi dan fungsi Shinto dari era Edo hingga Restorasi Meiji dalam konteks perubahan struktur kekuasaan Jepang. Data diperoleh melalui penelaahan literatur

serta karya akademik mengenai Shinto dan sejarah politik Jepang, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka teori relasi agama dan negara.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan agama Shinto

Agama Shinto merupakan kepercayaan asli Jepang yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Jepang itu sendiri. Shinto berkembang sebagai sistem kepercayaan berbasis ritual pemujaan alam serta penghormatan kepada *kami*, yaitu roh-roh suci yang diyakini bersemayam dalam unsur alam, leluhur, serta kekuatan animisme dan dinamisme. Sejak awal sejarah Jepang, Shinto tidak berdiri sebagai agama yang terpisah secara institusional, melainkan menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat (Azmi et al., 2023; Juita & Amanda, 2023). Oleh karena itu, Shinto pada mulanya lebih berfungsi sebagai fondasi kultural dan spiritual daripada sebagai sistem keagamaan yang terstruktur.

Keberadaan Shinto dapat ditelusuri hingga era Jomon (sekitar 300 SM) atau bahkan lebih awal, dan terus berkembang melewati berbagai periode sejarah Jepang. Perubahan penting terjadi sekitar abad ke-6 M ketika agama Buddha masuk ke Jepang. Pertemuan antara Shinto dan Buddhisme melahirkan bentuk sinkretisme yang dikenal sebagai *shinbutsu shūgō*. Dalam praktik ini, *kami* dipahami sebagai manifestasi atau pelindung ajaran Buddha, sementara ritual Shinto dan Buddhisme dijalankan secara berdampingan. Meskipun demikian, Shinto tidak kehilangan eksistensinya dan justru mampu menyerap unsur-unsur baru tanpa menghilangkan identitasnya sebagai sistem kepercayaan lokal. Kondisi ini bertahan melewati berbagai era, mulai dari Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi-Momoyama, hingga Edo (Edy, n.d).

Perubahan besar terjadi pada era Restorasi Meiji ketika pemerintah baru berupaya membangun negara modern yang terpusat dan kuat. Salah satu langkah penting adalah kebijakan pemisahan Shinto dan Buddhisme yang dikenal sebagai *shinbutsu bunri*. Kebijakan ini bertujuan menghapus praktik sinkretisme dan memurnikan Shinto dari unsur Buddhisme. Selanjutnya, Shinto dilembagakan sebagai Shinto Negara (*Kokka Shinto*) dan dijadikan fondasi ideologis untuk membangun identitas nasional, menanamkan loyalitas kepada kaisar, serta memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan modernisasi dan pengaruh Barat.

B. Era Edo (Pemerintahan Tokugawa)

Era Edo merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Jepang, yaitu ketika negara berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Periode ini dimulai ketika Tokugawa Ieyasu memenangkan Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan kemudian diangkat sebagai shogun pada 1603. Pemerintahan Tokugawa membentuk sistem politik yang dikenal sebagai *bakuhau*, yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (*bakufu*) yang dipimpin oleh shogun dan pemerintahan daerah (*han*) yang dikuasai oleh para *daimyo*. Sistem ini memungkinkan terciptanya stabilitas politik jangka panjang setelah berabad-abad konflik internal. Edo berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan shogun, sementara kaisar tetap berada di Kyoto sebagai simbol legitimasi tanpa memiliki kekuasaan politik yang nyata.

Stabilitas politik pada era Edo dipertahankan melalui berbagai kebijakan kontrol sosial yang ketat. Salah satu kebijakan terpenting adalah sistem *sankin-kōtai*, yang mewajibkan para *daimyo* untuk tinggal secara bergantian di Edo dan di wilayah kekuasaannya masing-masing, sementara keluarga mereka dijadikan sandera politik di ibu kota. Selain itu, pemerintahan Tokugawa menerapkan sistem stratifikasi sosial yang dikenal sebagai *shinōkōshō*, yang membagi masyarakat ke dalam kelas samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Struktur sosial yang kaku ini mengatur peran, status, dan interaksi sosial setiap kelompok demi menjaga ketertiban serta stabilitas masyarakat (Andriani, 2011).

Kebijakan politik luar negeri era Edo yang paling terkenal adalah *sakoku*, yaitu politik isolasi yang membatasi secara ketat hubungan Jepang dengan dunia luar. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah masuknya pengaruh asing yang dianggap mengancam stabilitas politik dan sosial.

Meskipun demikian, hubungan dengan luar negeri tetap ada dalam bentuk yang sangat terbatas. Politik isolasi ini menciptakan kondisi Jepang yang relatif aman dari konflik internasional, tetapi di sisi lain juga menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan pengetahuan dan adaptasi terhadap perubahan dunia luar.

C. Shinto Di Era Edo (1603-1868)

Pada awal era Edo, Shinto tidak diposisikan sebagai agama resmi negara, melainkan menyatu dengan Buddhisme yang telah memiliki sistem kelembagaan lebih teratur. Sejak periode-periode sebelumnya telah berkembang praktik yang disebut *shinbutsu shūgō*, yaitu sinkretisme antara ajaran Shinto dan Buddha. Dalam praktik ini, peribadatan sering dilakukan secara bersamaan, dengan unsur kedua tradisi dipadukan dan dipandang saling melengkapi (Yoshida, 2021).

Meskipun demikian, secara mendasar Shinto merupakan sistem kepercayaan yang berakar pada animisme dan dinamisme, yakni keyakinan bahwa alam semesta dipenuhi kekuatan spiritual yang hidup dan sakral. Shinto memandang gunung, sungai, hutan, laut, matahari, dan berbagai fenomena alam sebagai entitas yang memiliki roh atau kekuatan suci (*kami*) (Juita & Amanda, 2023b). Karena itu, alam tidak hanya dipahami sebagai lingkungan fisik, tetapi juga sebagai ruang sakral yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya.

Pemerintahan Tokugawa memanfaatkan sistem keagamaan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Tujuan utamanya adalah membatasi serta mengendalikan pengaruh yang dianggap mengancam kekuasaan keshogunan. Dalam konteks ini, Buddhisme, dengan struktur kelembagaan yang lebih mapan, memiliki posisi yang lebih strategis secara politik, sedangkan Shinto menempati posisi yang kurang menonjol dalam struktur pemerintahan, meskipun tetap dipraktikkan secara luas oleh masyarakat.

Berbeda dengan agama yang memiliki doktrin baku, kitab suci tunggal, dan tata ibadah yang seragam, Shinto tidak mengenal sistem teologi yang terpusat. Tidak ada satu tempat ibadah yang diwajibkan bagi seluruh penganut (Juita & Amanda, 2023b), serta tidak ada satu dewa yang secara mutlak berada di atas yang lain. Setiap *kami* memiliki peran dan kedudukannya masing-masing. Keluwesan inilah yang membuat Shinto mudah menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat lokal.

Dari perkembangan Shinto pada era Edo dapat disimpulkan bahwa kehidupan keagamaan berkembang melalui proses interaksi dan penyesuaian, bukan dalam bentuk yang terpisah secara kaku. Pola ini mendukung stabilitas pemerintahan Tokugawa (Yoshida, 2021), karena nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam praktik keagamaan turut menopang tatanan masyarakat.

Shinto pada era Edo juga dipengaruhi nilai moral Konfusianisme dan berperan dalam menjaga keteraturan sosial. Praktik ritual untuk leluhur dan roh, serta berbagai upacara desa, menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai ruang pertemuan antara manusia, dunia spiritual, dan kekuasaan simbolis (Verawati, 2006). Sifat sinkretis Shinto memungkinkannya hidup berdampingan dengan Buddhisme tanpa konflik berarti, sekaligus menjadikannya landasan identitas budaya dan simbol spiritual yang menghubungkan masyarakat, negara, dan kaisar. Kaisar yang diyakini sebagai keturunan dewi Amaterasu tetap dihormati secara simbolik meskipun kekuasaan politik berada di tangan shogun. Di tingkat pedesaan, peran Shinto tampak nyata dalam ritual pertanian, doa tolak bala, serta festival lokal seperti *matsuri* (Oleh, n.d.), yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Meskipun Shinto tersebar luas di berbagai wilayah Jepang, pada masa Edo pemerintahan Keshogunan Tokugawa menerapkan sistem kekuasaan *bakuban* gabungan antara *bakufu* (pemerintahan pusat shogun) dan *han* (wilayah kekuasaan daimyo) yang cenderung bersifat otoriter. Stabilitas politik yang tampak di permukaan sering kali menyembunyikan ketegangan sosial, terutama akibat pembatasan kebebasan sosial, ekonomi, dan keagamaan (*Dampak Restorasi Meiji Terhadap Agama Buddha....Pdf*, n.d). Dalam konteks ini, dinamika keagamaan menjadi salah satu cerminan relasi kuasa antara negara dan masyarakat, khususnya terhadap penganut Shinto. Seperti telah dibahas sebelumnya, Buddhisme memperoleh posisi yang lebih diunggulkan pada era Edo

dan sering kali mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Kebijakan ini pada awalnya ditujukan untuk mengontrol dan memberantas pengaruh agama Kristen (Putri & Yuniarsih, 2023), tetapi dalam praktiknya justru menempatkan Buddhisme seolah-olah sebagai agama resmi yang dilindungi negara, sementara Shinto dipinggirkan dan kehilangan otonomi sebagai agama asli Jepang.

Akibat kebijakan tersebut, muncul ketidakpuasan di kalangan penganut Shinto yang merasa praktik keagamaannya berada di bawah bayang-bayang struktur Buddhisme yang didukung keshogunan. Situasi ini diperparah oleh sistem pembedaan kelas sosial yang sangat ketat, dikenal sebagai sistem *Shinōkōshō*. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam lapisan hierarkis: *bushi* (samurai), *nōmin* (petani), *kōsakunin* (pengrajin), dan *shōnin* (pedagang). Di luar struktur utama terdapat kelompok *eta* dan *hinin* yang mengalami diskriminasi sosial berat. Pembagian kelas ini tidak hanya menentukan status sosial, tetapi juga mengatur pekerjaan, tempat tinggal, serta batas interaksi antarkelompok dalam kehidupan sehari-hari (Andriani, 2011).

Sistem *Shinōkōshō* berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif bagi pemerintahan Tokugawa. Setiap kelas menjalankan peran sesuai posisi yang telah ditetapkan, dan pelanggaran terhadap batas kelas dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban negara. Meskipun sistem ini berhasil menciptakan stabilitas jangka panjang, ia juga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan, terutama di kalangan petani dan pedagang yang secara ekonomi berkembang tetapi tetap berada pada posisi sosial rendah. Ketegangan akibat struktur sosial ini turut berkontribusi pada dinamika yang memicu perubahan besar menjelang runtuhnya rezim Tokugawa (Ningrum, 2021).

Dampak sistem sosial tersebut juga terasa dalam kehidupan keagamaan. Struktur masyarakat yang hierarkis membatasi ruang ekspresi religius di ranah publik, terutama bagi praktik keagamaan yang tidak secara langsung didukung negara (Andriani, 2011). Kondisi ini mendorong kehidupan religius berkembang lebih kuat di tingkat keluarga dan komunitas lokal yang relatif berada di luar pengawasan langsung pemerintah. Dalam ruang sosial inilah berbagai praktik kepercayaan, termasuk Shinto, tetap dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pembatasan tersebut semakin diperkuat oleh kebijakan *sakoku*, yaitu politik isolasi yang membatasi hubungan Jepang dengan dunia luar untuk mencegah masuknya pengaruh ideologis, politik, dan keagamaan asing (Widarahesty & Ayu, n.d.-b). Kombinasi antara struktur kelas sosial yang kaku dan kebijakan isolasionis ini membuat praktik keagamaan semakin bersifat lokal, tertutup, dan berbasis komunitas. Dalam situasi tersebut, Shinto justru menemukan ruang aman sebagai ekspresi spiritual yang dekat dengan kehidupan masyarakat, menyatu dengan tradisi lokal, serta berfungsi sebagai perekat kultural di tengah kontrol ketat negara Tokugawa.

D. Era Restorasi Meiji (1868-1912)

Pada tahun 1853, kekuasaan Tokugawa mulai terguncang akibat kedatangan Komodor Matthew Perry di Teluk Edo. Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Jepang menjadi pukulan besar bagi pemerintahan shogun. Dalam kurun waktu singkat, shogun tidak mampu lagi menolak tekanan asing, hingga akhirnya pada tahun 1858 menandatangani perjanjian dagang dengan kekuatan Barat. Peristiwa ini menandai berakhirnya kebijakan *sakoku* yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dampaknya menimbulkan keguncangan sosial-politik: sebagian kalangan mendukung pembukaan negara, sementara yang lain bersikeras mengusir orang asing. Setelah perjanjian tersebut, Keshogunan Tokugawa semakin dipandang lemah dan tidak mampu mempertahankan stabilitas. Pemerintah pusat kehilangan wibawa karena dianggap tunduk pada tekanan asing (Widarahesty & Ayu, n.d.-b). Masa krisis ini dikenal sebagai *bakumatsu*, yaitu akhir dari era Edo.

Seiring melemahnya kekuasaan shogun, perhatian politik kembali tertuju pada kaisar di Kyoto sebagai simbol legitimasi. Krisis ini juga memunculkan perdebatan ideologis di kalangan elite Jepang. Muncul slogan *sonnō jōi* (menghormati kaisar, mengusir orang asing) yang

mencerminkan kemarahan terhadap intervensi Barat sekaligus ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tokugawa (Ningrum, 2021).

Dalam situasi tersebut, domain Chōshū tampil sebagai salah satu pusat oposisi terkuat terhadap keshogunan. Sejak lama menjadi rival politik Tokugawa (Ningrum, 2021), Chōshū memanfaatkan melemahnya pemerintahan pusat untuk memperkuat posisinya. Ketidakpuasan terhadap kebijakan shogun, terutama setelah perjanjian dengan negara Barat, mendorong kalangan samurai Chōshū mengembangkan sikap politik yang radikal dan nasionalis. Mereka menjadi pengusung utama ideologi *sonnō jōi*. Tokoh-tokoh seperti Kido Takayoshi berperan penting dalam gerakan ini, termasuk dalam proses modernisasi militer Jepang yang kelak mendukung keberhasilan Restorasi Meiji (Ningrum, 2021).

Selain itu kondisi ini menyebabkan muncul tokoh seperti motoori norinaga yang merupakan pemikir Gerakan *kokugaku* (Studi Nasional) Secara konsep, Kokugaku adalah aliran intelektual di Jepang yang menekankan kajian terhadap tradisi, budaya, bahasa, dan teks klasik Jepang seperti *Kojiki*, *Nihon Shoki*, dan *Man'yōshū*, dengan tujuan menemukan “roh asli Jepang” yang murni (Ningrum, 2021). Para pemikir Kokugaku muncul sebagai respons terhadap dominasi intelektual asing di Jepang, terutama Buddhisme dan Konfusianisme, yang selama berabad-abad mempengaruhi pendidikan, etika, dan struktur sosial. Mereka melihat bahwa tradisi asli Jepang, termasuk mitologi, ritual, dan nilai-nilai lokal, telah tersamarkan oleh pengaruh Cina dan India.

Motoori Norinaga menjadi tokoh sentral yang memberikan dasar intelektual bagi penguatan identitas Jepang berbasis tradisi lokal. Ia menekankan kedudukan kaisar sebagai keturunan dewi matahari Amaterasu, sehingga memperkuat posisi Shinto sebagai sistem kepercayaan yang terkait erat dengan kekaisaran. Pemikiran *Kokugaku* juga mendorong pemisahan ritual Shinto dari praktik sinkretis dengan Buddhisme serta menegaskan pentingnya kemurnian tradisi lokal (Azmi et al., 2023). Gagasan ini menjadi landasan bagi gerakan pemurnian Shinto.

Perkembangan tersebut berkontribusi pada runtuhnya sistem keagamaan era Edo, termasuk dominasi Buddhisme dalam administrasi keagamaan. Pada era Meiji, pemisahan resmi antara Shinto dan Buddhisme dikenal sebagai *Shinbutsu Bunri*, yang membawa dampak besar terhadap struktur keagamaan Jepang (Juita & Amanda, 2023a). Shinto kemudian dilembagakan sebagai agama negara dan dijadikan fondasi ideologis untuk membangun identitas nasional, memperkuat loyalitas kepada kaisar, serta menyatukan masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi. Dengan demikian, pemikiran Motoori Norinaga dan gerakan *Kokugaku* tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berdampak langsung pada reorganisasi sosial dan keagamaan Jepang. Shinto memperoleh kembali kedudukannya sebagai agama yang berdiri sendiri dan menjadi simbol identitas nasional serta dasar legitimasi kekaisaran modern pada era Restorasi Meiji.

E. Agama Shinto Di Era Meiji

Shinto pada era Meiji mengalami perubahan besar-besaran dan menjadi tonggak paling menentukan dalam sejarah Jepang modern. Era Meiji dimulai sejak tahun 1868, yang menandai kembalinya kekaisaran sebagai penguasa tertinggi. Pada masa ini, Shinto tidak lagi sekadar praktik kepercayaan tradisional masyarakat Jepang, melainkan berubah menjadi fondasi ideologis negara. Dalam era Restorasi Meiji, agama dijadikan alat pembangun identitas nasional (Azizah et al., 2025). Hal ini berbeda dengan pemerintahan Tokugawa yang cenderung membatasi peran Shinto. Pada era sebelumnya, masyarakat Jepang tidak memandang Shinto dan Buddhisme sebagai sesuatu yang bertentangan. Namun, kondisi ini berubah drastis ketika pemerintah Meiji menganggap sinkretisme tersebut menghambat pembentukan negara modern yang terpusat.

Menurut Prof. Mark Teeuwen, pakar sejarah Shinto, Shinto bukanlah sistem agama yang mapan sebelum era Meiji, melainkan sebatas praktik kuil-kuil lokal di Jepang. Shinto baru mengalami perubahan signifikan menjadi agama dan ideologi terpadu melalui intervensi negara modern.

Salah satu kebijakan penting pada masa ini adalah pemisahan Shinto dan Buddhisme yang dikenal sebagai *shinbutsu bunri*. Kebijakan ini bertujuan membersihkan unsur-unsur Buddhisme

dari praktik keagamaan Shinto. Shinto kemudian diposisikan sebagai tradisi asli Jepang yang murni dan tidak terpengaruh budaya asing. Pemerintah Meiji memandang Shinto sebagai sarana ideologis yang efektif untuk menanamkan loyalitas rakyat kepada kaisar. Kaisar direpresentasikan sebagai keturunan langsung dewi matahari Amaterasu Ōmikami (Afrianti, 2018; Azmi et al., 2023), sehingga ketaatan kepada kaisar dipandang sebagai kewajiban religius sekaligus kewajiban nasional. Konsep ini dikenal sebagai Kokka Shinto (Shinto Negara).

Shinto Negara berbeda dari Shinto rakyat yang sebelumnya berkembang secara lokal dan beragam. Shinto Negara disusun secara sistematis oleh pemerintah dan dilembagakan melalui hukum serta kebijakan negara. Salah satu simbol penting Shinto era Meiji adalah pembangunan dan penguatan kuil-kuil nasional seperti Ise Jingū, yang dipandang sebagai pusat spiritual bangsa Jepang karena berkaitan langsung dengan dewi Amaterasu. Shinto Negara juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Anak-anak Jepang diajarkan tentang kesucian kaisar, kewajiban berbakti kepada negara, serta nilai-nilai moral yang dikaitkan dengan Shinto (Anwar, 2007). Pendidikan moral (shūshin) menjadi sarana utama penanaman ideologi negara. Shinto era Meiji menekankan konsep kokutai atau “hakikat negara Jepang”, yaitu gagasan bahwa Jepang adalah negara unik yang dipersatukan oleh garis keturunan kaisar dan kehendak ilahi. Konsep ini menjadi dasar nasionalisme Jepang modern. Agama-agama lain seperti Buddhisme dan Kristen menghadapi tekanan besar pada awal era Meiji. Buddhisme kehilangan banyak pengaruh dan aset akibat kebijakan anti-Buddha, sementara Kekristenan, meskipun telah dilegalkan, tetap diawasi ketat karena dianggap berpotensi mengganggu loyalitas kepada kaisar.

Meskipun demikian, Shinto rakyat tetap bertahan di tingkat lokal, walau berada di bawah bayang-bayang Shinto Negara. Praktik seperti festival **matsuri**, pemujaan kami lokal, dan ritual pertanian masih dijalankan masyarakat, meski sering disesuaikan agar selaras dengan ideologi negara. Menariknya, modernisasi ala Barat yang dijalankan pemerintah Meiji berjalan berdampingan dengan penguatan Shinto (Adriani, 2007; Oleh, n.d). Di satu sisi, Jepang mengadopsi teknologi, sistem hukum, dan pemerintahan Barat. Di sisi lain, Shinto digunakan untuk menegaskan identitas Jepang yang unik dan berbeda dari Barat. Dengan demikian, Shinto berfungsi sebagai penyeimbang budaya dalam arus modernisasi. Kritik terhadap Shinto Negara mulai muncul dari kalangan intelektual dan penganut agama lain. Mereka menilai negara telah menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik. Namun, kritik semacam ini sering ditekan oleh pemerintah. Menjelang akhir era Meiji, sistem Shinto Negara telah mengakar kuat dalam struktur negara dan fondasi ideologis ini diteruskan pada era Taishō dan Shōwa, dengan dampak yang terasa hingga Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Shinto Negara secara resmi dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Amerika. Kaisar menyatakan bahwa dirinya bukan makhluk ilahi, dan pemisahan agama serta negara ditegaskan dalam konstitusi baru. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Shinto era Meiji sebelumnya.

Shinto di era Meiji merupakan contoh bagaimana agama dan kepercayaan dapat direkonstruksi untuk kepentingan negara. Shinto tidak hanya berfungsi sebagai sistem spiritual, tetapi juga sebagai ideologi nasional. Transformasi ini meninggalkan dampak mendalam bagi sejarah Jepang modern. Memahami Shinto era Meiji berarti memahami fondasi nasionalisme Jepang. Shinto era Meiji juga menjadi kajian penting dalam studi agama dan politik karena menunjukkan bagaimana negara dapat mendefinisikan ulang makna agama. Kasus Jepang sering dibandingkan dengan bentuk-bentuk nasionalisme religius di negara lain, sehingga menjadikannya tetap relevan hingga saat ini. Secara keseluruhan, Shinto di era Meiji bukan sekadar kelanjutan tradisi lama, melainkan sebuah transformasi besar. Tradisi, mitologi, dan ritual lama dipadukan dengan kepentingan negara modern. Dari sinilah lahir bentuk Shinto yang sangat politis.

Pada akhir abad ke-19, pemerintahan Meiji mencapai puncak kejayaannya. Dalam periode ini, Shinto menempati posisi yang sangat penting karena berperan sebagai instrumen pendidikan moral dan loyalitas politik. Ajaran Shinto ditanamkan melalui kurikulum sekolah, upacara kenegaraan, hingga ritual publik. Rakyat diajarkan bahwa kesetiaan kepada kaisar adalah kewajiban suci. Dengan demikian, Shinto pada masa ini tidak diposisikan sebagai agama dalam arti teologis,

melainkan sebagai ideologi nasional yang berbasis pada mitologi kekaisaran.

Pada saat yang sama, Jepang mulai membuka diri terhadap dunia luar, termasuk terhadap Islam. Hubungan dengan Islam sebenarnya telah terjadi sejak periode Edo melalui pedagang Asia Tengah, tetapi baru memperoleh bentuk yang lebih konkret pada era Meiji melalui hubungan diplomatik dan intelektual dengan Kekaisaran Turki Usmani. Salah satu tonggak awal yang penting adalah penerjemahan karya tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ke dalam bahasa Jepang pada tahun 1877. Penerjemahan ini tidak dilakukan dalam konteks dakwah, melainkan sebagai bagian dari minat intelektual Jepang terhadap peradaban dunia, khususnya agama-agama besar yang memiliki pengaruh global. Islam mulai dipahami sebagai sistem kepercayaan sekaligus peradaban besar yang berperan penting dalam sejarah dunia (Dinamika Perkembangan Islam di Jepang Abad ke-20,” n.d).

Turki Usmani, sebagai simbol pusat kekuatan Islam global, memandang Jepang sebagai negara yang berhasil melakukan modernisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Pada tahun 1890, kunjungan kapal Ertuğrul ke Jepang membuka ruang pertukaran budaya dan pemikiran, termasuk pengenalan Islam kepada masyarakat Jepang. Dalam konteks ini, Islam pertama kali dikenal bukan sebagai agama misionaris yang agresif, melainkan sebagai sistem etika, hukum, dan peradaban (Dinamika Perkembangan Islam di Jepang Abad ke-20,” n.d).

Islam juga kerap dibandingkan dengan Shinto sebagai “agama negara” dalam dunia Islam. Kekhalifahan Usmani dipandang sejajar dengan sistem kekaisaran Jepang. Beberapa pemikir Jepang bahkan melihat Islam sebagai mitra ideologis potensial dalam menghadapi dominasi Barat yang berakar pada tradisi Kristen. Namun demikian, meskipun terdapat ketertarikan intelektual terhadap Islam, agama ini tidak berkembang pesat di Jepang pada era Meiji.

Menjelang akhir era Meiji, terjadi pergeseran dalam posisi Shinto. Pemerintah mulai menegaskan bahwa Shinto bukanlah agama, melainkan tradisi nasional yang diwariskan secara turun-temurun. Pernyataan ini bertujuan menyesuaikan kebijakan Shinto dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Dengan cara ini, negara tetap dapat mewajibkan partisipasi dalam ritual Shinto tanpa dianggap melanggar hak kebebasan beragama warga.

Kebijakan tersebut berdampak pada posisi agama-agama lain di Jepang, seperti Buddhisme, Kristen, dan Islam. Agama-agama ini diizinkan berkembang, tetapi dibatasi pada ruang privat dan komunitas masing-masing. Sementara itu, Shinto tetap hadir dalam ruang publik sebagai simbol persatuan bangsa dan identitas nasional Jepang.

Penutup

Berdasarkan uraian historis di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan Shinto tidak pernah terlepas dari dinamika hubungan antara agama, budaya, dan kekuasaan politik di Jepang. Pada fase awal, Shinto berfungsi sebagai fondasi kultural-spiritual yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, tanpa struktur teologis yang terpusat. Keluwesan ini memungkinkan Shinto beradaptasi dengan masuknya Buddhisme melalui pola sinkretisme *shinbutsu shūgō*, sehingga agama dan budaya berkembang secara koeksisten selama berabad-abad.

Pada era Edo, meskipun Shinto tetap hidup dalam praktik masyarakat, posisinya secara politik berada di bawah bayang-bayang struktur keagamaan Buddhisme yang dimanfaatkan oleh rezim Tokugawa sebagai instrumen kontrol sosial. Kebijakan stratifikasi sosial (*shinōkōshō*) dan isolasi (*sakoku*) mendorong praktik keagamaan menjadi semakin lokal dan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, Shinto bertahan bukan sebagai kekuatan institusional negara, tetapi sebagai perekat kultural dan spiritual masyarakat akar rumput.

Transformasi paling menentukan terjadi pada era Restorasi Meiji. Negara modern yang sedang dibangun membutuhkan fondasi ideologis yang mampu menyatukan rakyat, dan Shinto direkonstruksi untuk memenuhi fungsi tersebut. Melalui kebijakan *shinbutsu bunri* dan pelembagaan *Kokka Shinto*, Shinto bergeser dari tradisi keagamaan lokal menjadi ideologi nasional yang menopang legitimasi kekaisaran dan membentuk identitas kolektif Jepang. Pada tahap ini, agama tidak lagi hanya berperan dalam ranah spiritual, tetapi menjadi instrumen politik, pendidikan moral,

dan integrasi nasional.

Menjelang akhir era Meiji, redefinisi Shinto sebagai “tradisi nasional” (bukan agama) menunjukkan strategi negara dalam menegosiasikan modernitas, konstitusionalisme, dan kontrol ideologis. Agama-agama lain diberi ruang terbatas di ranah privat, sementara Shinto tetap mendominasi ruang publik sebagai simbol persatuan bangsa. Dengan demikian, sejarah Shinto memperlihatkan pola penting dalam studi relasi agama dan negara: sebuah tradisi lokal dapat direkonstruksi menjadi ideologi nasional ketika negara memerlukan legitimasi kultural dan simbolik.

Daftar Pustaka

- Adriani, S. D. (2007). Eksistensi agama Shinto dalam pelaksanaan matsuri di Jepang. *Lingua Cultura*, 1(2), 132–141. <https://doi.org/10.21512/lc.v1i2.319>
- Afrianti, M. (2018). Dewi Izanami dan Dewa Izanagi dalam agama Shinto Jepang (studi semiotik dalam film *Noragami Aragoto*). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 14(2), 169–193. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2018.1402-02>
- Alfanla, Y. (2000). Peran Kido Takayoshi dalam Restorasi Meiji [Other, Universitas Darma Persada]. <http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2>
- Andriani, S. D. (2011). Dampak pelaksanaan sistem pemerintahan feodalisme terhadap pembentukan sistem stratifikasi sosial (Shinokosho) pada zaman Edo. *Humaniora*, 2(2), 1288–1294. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3190>
- Anwar, E. N. (2007). Ideologi keluarga tradisional “IE” dan Kazoku Kokka pada masyarakat Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II. *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(2), 194. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.212>
- Azizah, Putri, W. A., Fauziah, R., Rahmawati, S., & Fatonah. (2025). Restorasi Meiji, modernisasi Jepang. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6(2). <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/609>
- Azmi, Z., Siregar, A. R., & Ramadi, B. (2023). Sejarah agama Shinto dan perkembangannya di Jepang. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 1(2), 11–20. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1408>
- Dampak Restorasi Meiji terhadap Agama Buddha....pdf. (n.d.). <http://repository.unsada.ac.id/7112/1/Dampak%20Restorasi%20Meiji%20Terhadap%20Agama%20Buddha....pdf>
- Edy, A. (n.d.). Program studi Magister Linguistik, Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar 2020.
- From Country to Nation: Ethnographic Studies, “Kokugaku,” and Spirits in Nineteenth-Century Japan by Gideon Fujiwara | Mark Teeuwen. (n.d.). *Monumenta Nipponica*. <https://dept.sophia.ac.jp/monumenta/article/from-country-to-nation-ethnographic-studies-kokugaku-and-spirits-in-nineteenth-century-japan-by-gideon-fujiwara/>
- Juita, J., & Amanda, T. A. (2023). Sejarah agama Shinto dan perkembangannya di Jepang. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(2), 168–181. <https://doi.org/10.30651/ah.v9i2.15712>
- NINGRUM, W. P. (2021). Pergeseran peran samurai sebelum dan sesudah era Meiji [Skripsi, Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA]. <https://repository.stba-jia.ac.id/324/>
- Oleh, D. (n.d.). Disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Agama-Agama Dunia, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Minat Studi Ekonomi Islam.
- Pakpahan, E., Melsa, Zahra, A. R., Amanda, D., & Fatonah. (2025). Jepang terbuka bagi bangsa asing. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(3). <https://ijurnal.com/1/index.php/jipd/article/view/934>
- Putri, G. B., & Yuniarsih. (2023). Pengaruh kebijakan sakoku pada agama Kristen di Jepang. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha*, 9(3), 183–190. <https://doi.org/10.23887/jpbj.v9i3.59683>

- Verawati, M. P. (2006). Kepercayaan dan peribadatan agama Shinto [Other, UNSADA]. <http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2>
- Widarahesty, Y., & Ayu, R. (n.d.-a). Pengaruh politik isolasi (Sakoku) Jepang terhadap nasionalisme bangsa Jepang: Studi tentang politik Jepang dari zaman Edo (feodal) sampai Perang Dunia II.
- Widarahesty, Y., & Ayu, R. (n.d.-b). Pengaruh politik isolasi (Sakoku) Jepang terhadap nasionalisme bangsa Jepang: Studi tentang politik Jepang dari zaman Edo (feodal) sampai Perang Dunia II.
- Yoshida, K. (Ed.). (2021). *Shinbutsu yūgō no Higashi Ajia-shi* (Shohan). Nagoya Daigaku Shuppankai.